

## MENGUNGKAP MISPERSEPSI SISWA MADRASAH ALIYAH ATAS TUDUHAN NEPOTISME TERHADAP KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN (644-656 M)

Kresna Azhi Fahlevi,<sup>1</sup> Fatiyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>1</sup>email [kafahlevi2772@gmail.com](mailto:kafahlevi2772@gmail.com)

### ABSTRAK

Proses pembelajaran di tingkat Madrasah Aliyah yang berlandaskan Kurikulum 2013 dilakukan dengan menggunakan buku bahan ajar yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Buku Siswa Mata Pelajaran Sejarah dan Kebudayaan Islam untuk Siswa Kelas X Madrasah Aliyah. Sayangnya, dalam pembahasan sejarah tuduhan nepotisme terhadap Khalifah Utsman bin Affan masih terdapat tulisan yang butuh penjelasan lebih lanjut. Namun, faktanya poin pembahasan ini masih seringkali diabaikan sehingga menimbulkan mispersepsi bagi peserta didik, bahkan hingga lulus. Kajian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah serta kajian *library research*. Kajian ini juga merupakan bagian dari kajian sejarah dunia Islam untuk melengkapi serta mengulik lebih dalam mengenai tuduhan nepotisme yang dilayangkan kepada Khalifah Utsman bin Affan dalam buku SKI kelas X MA yang melatarbelakangi munculnya mispersepsi di kalangan siswa. Beberapa buku siswa yang disusun oleh Kemenag menjadi acuan utama untuk kemudian diklarifikasi dengan berbagai sumber lainnya seperti karya dari Khalid Muhammad Khalid dan karya-karya lainnya. Berdasarkan hasil kajian, Utsman bin Affan tidak melakukan nepotisme tanpa pertimbangan tertentu sehingga tindak nepotisme yang dilakukannya dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam. Mulai dari sini peran dari pihak pemerintah, sekolah dan murin sendiri sangat penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman berdasarkan strategi terkait buku bahan ajar.

**Kata Kunci:** *Mispersepsi, Utsman bin Affan, Nepotisme, Siswa Madrasah Aliyah, Kurikulum.*

### ABSTRACT

*The learning process at the Madrasah Aliyah level which is based on the 2013 Curriculum is carried out using teaching material books provided by the government. One of them is the Student's Book of Islamic History and Culture for Class X Students of Madrasah Aliyah. Unfortunately, in discussing the history of accusations of nepotism against Caliph Uthman bin Affan there are still articles that need further explanation. However, the fact is that this discussion point is often ignored, causing misperceptions among students, even after graduation. This study uses historical research methodologies and library research studies. This study is also part of the study of the history of the Islamic world to complement and dig deeper into the accusations of nepotism leveled against Caliph Uthman bin Affan in the class X MA SKI book which is the background to the emergence of misperceptions among students. Several student books compiled by the Ministry of Religion became the main reference to be later clarified with various other sources such as works by Khalid Muhammad Khalid and other works. Based on the results of the study, Uthman bin Affan did not commit nepotism without certain considerations so that the act of nepotism that he did was considered something that was permissible in Islam. Starting from here, the role of the government, schools and students themselves is very important to prevent the emergence of misunderstandings based on strategies related to textbooks*

**Keywords:** *Misperception, Utsman bin Affan, Nepotism, Aliyah Madrasa Students, Curriculum.*

## A. PENDAHULUAN

Pasca wafatnya Rasulullah Saw kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh 4 (empat) orang sahabat Nabi yang mulia secara berurutan, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M), Umar bin Khattab (634-644 M), Usman bin Affan (644-656 M) dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M). Keempat orang sahabat Nabi ini kemudian disebut sebagai *Khulafah ar-Rasyidin* (Para Penggati yang mendapat petunjuk). Mereka merupakan para pemimpin umat Islam yang dipilih langsung melalui mekanisme demokratis dengan segala pertimbangan oleh para sahabat Nabi lainnya. Setelah seorang terpilih maka sahabat yang lain akan memberikan sumpah setianya (*bai'at*) kepada calon khalifah yang terpilih tersebut.<sup>1</sup> Dimulai dari terpilihnya Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah musyawarah yang Panjang dengan para pemimpin kaum Anshor di Saqifah Bani Sa'idah. Terpilihnya Umar bin Khattab melalui penunjukkan langsung khalifah sebelumnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang tertera dalam sebuah surat. Pemilihan melalui pembentukan tim formatur yang berakhir dengan terpilihnya Usman bin Affan. Terakhir, pembai'atan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat melalui yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam kala itu.

Berbagai pencapaian telah ditorehkan oleh para khalifah yang mewarnai serangkaian dinamika kejayaan umat Islam. Pada masing-masing masa kepemimpinan *khulafah ar-rasyidin* tentu memiliki kebijakan tersendiri yang dibuat dengan berbagai pertimbangan baik buruk tentu dilandaskan pada sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Namun, di balik segala macam kegemilangan yang dicapai pada masa kepemimpinan *Khulafah ar-Rasyidin* tentu masalah demi masalah tidak dapat secara total dibantah oleh sejarah bahkan hingga menimbulkan tragedi. Beberapa tragedi yang terjadi pada era ini adalah terbunuhnya 3 (tiga) orang khalifah terakhir, yakni Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, oleh para oknum yang ditutupi oleh dendam kesumat. Diantara tragedi yang kemudian menimbulkan tragedi-tragedi lainnya hingga mengakibatkan era kepemimpinan *Khulafah ar-Rasyidin* berakhir adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tanggal 17 Juni 656 M/35 H.<sup>2</sup> Hal ini tidak terlepas dari berbagai tuduhan dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan yang dibuat Utsman khususnya pada periode kedua masa pemerintahannya. Utsman dituduh sebagai seorang nepotis karena banyak merekrut anggota keluarganya menjadi pejabat negara.

Jika melihat dari literatur sejarah Islam yang digunakan di tingkatan MA (Madrasah Aliyah), yakni Buku Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas X terbitan Kemenag, disana dituliskan

---

<sup>1</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2019), cet. VIII, hlm 77.

<sup>2</sup> Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2012), cet. IV, hlm 55-56.

tentang sebab-sebab Khalifah Usman terbunuh. Salah satu sebabnya adalah perilaku nepotisme yang ia lakukan kepada anggota keluarganya. Tulisan-tulisan tersebut tentu tidak bisa secara langsung dianggap benar tanpa penjelasan lebih lanjut. Hal ini barang tentu akan menjurus pada banyaknya mispersepsi yang dialami oleh siswa MA, terkhusus yang tidak mendalami pengetahuan sejarah Islamnya lebih lanjut. Berdasarkan fakta-fakta di atas peneliti bermaksud mencari kebenaran di balik tuduhan nepotisme yang dilayangkan kepada Utsman, khususnya dalam buku referensi sejarah Kebudayaan Islam tingkat Madrasah Aliyah kelas X, dengan lebih lengkap. Jikalau benar, tentu banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang Utsman lakukan sehingga dengan terpaksa harus melakukan perbuatan tersebut. Mungkinkah seorang sahabat pemalu yang Rasulullah Saw percayakan kedua anaknya untuk dinikahi akan melakukan perbuatan tercela tersebut. Khalifah Utsman bin Affan bahkan termasuk salah seorang *Asyarah Mubasyarah*, atau sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seseorang yang dijamin masuk surga, pantas melakukan perbuatan yang tercela dan merugikan rakyatnya. Sedangkan Islam mengajarkan tentang keadilan dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam firman-firman kudusnya.

Kajian mengenai tuduhan ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar gambaran kepribadian sosok Utsman bin Affan dapat terjawab secara utuh. Oleh karena itu penulis akan mengambil judul “Tuduhan Nepotisme terhadap Utsman bin Affan (644-656 M): Mispersepsi Lulusan Madrasah Aliyah (MA) dalam Buku Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam tingkat Madrasah Aliyah Kelas X”. Selain itu penggambaran Khalifah Utsman dalam Buku Pelajaran SKI kelas X tak luput dari perhatian penulis sehingga dapat ditemukan letak pembahasan yang menimbulkan mispersepsi bagi para lulusan MA. Adapun pada bagian akhir pembahasan, penulis akan menyampaikan sedikit solusi dan saran terkait upaya yang kiranya dapat dilakukan baik itu oleh pihak pemerintah, tenaga pendidik dan para siswa agar mispersepsi ini tidak terus menerus larut di benak pelajar, khususnya dalam lingkup Madrasah Aliyah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian ini merupakan pengembangan dari berbagai kajian lainnya yang meneliti tentang sejarah kepemimpinan Utsman bin Affan pada masa Khulafa' ar-Rasyidin. Terdapat lima sumber utama terkait dengan kajian ini yakni tiga *Buku Siswa Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* yang disusun oleh karya dari [1] Elfa Tsuroyya, [2] Miftachul Ula, Maria Ulfa, & M. Husein Tuanaya, dan [3] Muh. Asnawi, Sugiyono, & Moh. Sulaiman. Dalam ketiga buku ini berisi bahan ajar atau materi yang digunakan untuk mengajar

siswa kelas X MA didalamnya pula terdapat penggambaran Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian dijelaskan lebih rinci melalui dua buku lainnya, yakni buku *Biografi Utsman bin Affan* karya Ali Muhammad Ash-Shalabi yang diterjemahkan oleh Masturi Ilham dan Malik Supar, dan buku *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* karya M. Abdul Karim.

Karya ini mengambil melakukan integrasi antara beberapa sumber tersebut sebagai salah satu metode menjawab serta mengkaji lebih jauh tentang tuduhan nepotisme Utsman bin Affan dan hubungannya dengan kesalahpahaman atau mispersepsi di kalangan siswa Madrasah Aliyah. Berbagai perspektif yang disajikan dalam karya tersebut menjadi perdebatan yang menarik untuk didiskusikan, khususnya dalam strategis pencegahan dan pelurusan kesalahpahaman ini sehingga kajian ini mengambil poin pengalaman yang dirasakan oleh beberapa orang.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah metode penelitian sejarah,<sup>3</sup> dengan menggunakan gaya penulisan sejarah analisis (*analytical history*), yaitu penulisan sejarah yang memanfaatkan teori dan metodologi. Melalui gaya penulisan ini peneliti akan menjelaskan asal-mula (*genesis*), sebab-sebab (*causes*), kecenderungan (*trend*), kondisi pada saat itu dan perubahannya (*change*) dari konteks peristiwa tentunya dengan mengaitkan masalah-masalah politik, ekonomi dan sebagainya.<sup>4</sup>

Adapun langkah-langkah penulisan yang peneliti tempuh adalah sebagai berikut:

#### 1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani '*heuristic*' yang artinya memperoleh. Heuristik adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Adapun sumber sejarah yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni sumber primer berupa arsip-arsip naskah sezaman. Selain itu peneliti juga akan menggunakan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>5</sup>

Dalam proses pengumpulan sumber data sejarah ini peneliti akan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi kearsipan, yakni teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan studi mengenai sumber-sumber tertulis seperti naskah, buku, jurnal

---

<sup>3</sup> Menurut pendapat Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 103.

<sup>4</sup> M. Dien Madjid & Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 2018.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, hlm. 104-105.

yang diterbitkan dan arsip-arsip yang berkaitan dengan judul yang akan penulis bahas.<sup>6</sup>

## 2. Verifikasi

Langkah selanjutnya setelah sumber-sumber data sejarah terkumpul adalah verifikasi atau disebut juga kritik sumber. Peneliti berusaha untuk memperoleh keabsahan sumber baik tentang keaslian sumber (*otentisitas*) yang dilakukan melalui kritik eksternal maupun tentang kesahihan sumber (*kesahihan*) yang ditelusuri melalui kritik internal.<sup>7</sup> Kedua jenis kritik ini peneliti gunakan untuk mengungkap kebenaran sejarah berdasarkan sumber-sumber yang otentik dan kredibel pada kisaran periode waktu peristiwa yang peneliti ambil.

## 3. Interpretasi

Setelah sumber data yang diperoleh telah dipastikan absah dan sah, penelitian ini kemudian memasuki tahap interpretasi atau disebut juga analisis sejarah. Dalam tahap ini peneliti melakukan sistesis (penyatuan) terhadap sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah untuk kemudian ditafsirkan dan dikembangkan sesuai dengan imajinasi peneliti dengan tetap berpegang pada data dan fakta yang sudah terkumpul. Menurut apa yang disampaikan dari tulisan M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi dalam bukunya *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* dapat difahami bahwa penggunaan imajinasi dalam proses interpretasi ini penting bagi peneliti karena seringkali muncul beberapa celah gelap dalam fakta-fakta sejarah yang diperoleh sehingga peneliti harus berusaha menggambarkan peristiwa yang diteliti dalam sebuah kurun waktu tertentu dan merasakan apa yang mungkin terjadi.

## 4. Historiografi

Tahap terakhir dari langkah penulisan sejarah adalah tahap historiografi dimana sejumlah data dan fakta sejarah yang telah diolah melalui tahapan-tahapan sebelumnya kemudian dituliskan dalam sebuah karya. Pemaparan hasil penelitian ini dituliskan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah diatur dalam pedoman penulisan dan hendaknya berisi gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) hingga (penarikan kesimpulan).

---

<sup>6</sup> Madjid & Wahyudi, *Ilmu Sejarah*, hlm. 222-223.

<sup>7</sup>Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, hlm. 108.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sosok Utsman ibn Affan Berdasarkan Buku Sejarah Kebudayaan Islam Tingkat MA Kelas X

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa salah satu indikatornya dapat dilihat melalui bagaimana perkembangan bangsa tersebut di sektor pendidikan. Hal ini mengacu pada pentingnya sektor ini dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu membangun bangsa ke depan. Pentingnya pendidikan sebagai pilar pembangunan bangsa secara tegas tertuang dalam pembukaan UUD 1945, terkhusus dalam Alinea ke-4 yakni terkait salah satu tujuan Indonesia untuk “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Cerdas dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sendiri dijalankan berdasarkan satu sistem pendidikan nasional dengan salah satu bahasanya mengenai pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini diselenggarakan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan berfokus pada peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.<sup>8</sup>

Peranan pendidikan Islam di kalangan umat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islami untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan (internalisasi), dan mentransformasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada pribadi generasi penerusnya sehingga nilai-nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan maka pendidikan Islam ini salah satunya diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal yang sering kita kenal dengan madrasah.<sup>9</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di madrasah, kita tentu membutuhkan suatu pedoman dasar dalam prosesnya atau yang sering disebut juga dengan kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>10</sup> Adapun cakupan

---

<sup>8</sup> Faridah Alawiyah, “Pendidikan Madrasah di Indonesia”, *Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, hlm. 51-52.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

kurikulum berdasarkan pengertian tersebut terbagi menjadi 2 (dua) dimensi, yakni [1] rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar, dan [2] cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.<sup>11</sup>

Berbagai kurikulum telah disusun oleh pihak Kemendikbud dan Kemenag dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 sebagaimana telah disampaikan di atas, termasuk salah satunya adalah kurikulum 2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, bahwa kurikulum yang diterapkan dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MT) dan Madrasah Aliyah (MA) adalah Kurikulum 2013. Melalui penerapan kurikulum ini diharapkan para siswa madrasah dapat lebih aktif dan kritis ketika belajar di kelas juga mampu bekerja sebagai tim dengan tetap memperhatikan posisinya baik sebagai seorang Muslim, siswa maupun sebagai warga negara. Hal ini juga terlihat dari tujuan dari Kurikulum 2013 ini yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup>

Namun, di balik segala inovasi dan pembaruan yang dicanangkan dalam kurikulum ini tentu tidak bisa lepas dari kelemahan atau kekurangan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari kurangnya kompetensi guru, faktor materi pembelajaran untuk siswa, hingga faktor lembaga sekolah dan pemerintahan. Salah satu kelemahan dari penerapan kurikulum ini adalah pihak lembaga sekolah yang kurang mandiri dalam menyikapi kurikulum yang ada. Jika pada kurikulum yang sebelumnya sekolah sangat independen dan dapat menentukan kurikulum sendiri, maka pada kurikulum 2013 ini semua materi ajar dan kurikulumnya harus mengikuti pusat. Hal ini menyebabkan sekolah kurang dapat aktif membentuk ciri khas lembaga.<sup>13</sup> Karena dalam kurikulum 2013 ini pihak lembaga sekolah harus mengikuti arahan pusat maka buku pedoman yang digunakan juga harus sesuai dengan buku panduan bagi siswa didik (disebut juga buku siswa) yang diberikan oleh Kemenag.

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Admin web SMK Al-Husna, "Kekurangan dan Kelebihan Kurikulum 2013", diakses melalui laman web smkalthusna.sch.id: <https://smkalthusna.sch.id/2021/03/31/kekurangan-dan-kelebihan-kurikulum-2013/> (5 Desember 2022).

Hal ini tentu selain menyebabkan sekolah kurang mandiri dan terlalu bergantung pada pemerintah, juga berdampak pada pihak guru dan siswa. Kurang siapnya para guru dalam menerapkan kurikulum ini juga penyampaian bahan materi yang hanya berpaku pada buku paket siswa, tentu bisa jadi memunculkan masalah baru bagi para peserta didik. Selain itu para siswa yang cenderung terbiasa pasif dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja tanpa mencari sumber yang lain tentu turut menyebabkan masalah ini semakin bertarut-larut. Salah satu bukti permasalahan ini dapat dilihat dalam buku siswa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah (MA) kelas X, khususnya mengenai pembahasan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada masa Khulafa al-Rasyidin. Penggambaran terbunuhnya Utsman yang disebabkan oleh tuduhan nepotisme yang dituliskan dalam buku ini tentu akan menimbulkan salah faham dan mispersepsi bagi peserta didik mengingat para guru yang terlalu terpaku pada apa yang dituliskan dalam buku pedoman siswa. Maka dari itu disini akan lebih menarik kiranya kita melihat bagaimana penggambaran sosok Khalifah Utsman bin Affan dari tulisan yang terdapat dalam beberapa buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam untuk tingkat MA kelas X.

#### a. Biografi Utsman

Utsman ibn Affan adalah salah seorang sahabat Nabi yang lahir pada tahun 574 M di Thaif.<sup>14</sup> Nama lengkap beliau adalah 'Usman bin 'Affan bin al-'Ash bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, al-Quraisyi al-Umawi al-Makki. Nama ibunya adalah Arwa binti Kuriz bin Rabiah dan ayahnya bernama 'Affan ibn al-'Ash. Ayahnya merupakan seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy-Umayyah. Nasab Utsman bertemu dengan nasab Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasalam* melalui garis ibunya pada Abdi Manaf ibn Qushay. Sedangkan melalui garis ayahnya bersambung melalui Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf.<sup>15</sup>

Pada usia remaja, Usman sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri. Abu Bakar, salah satu sahabat nabi dan sebagai teman dagang. Lewat Abu Bakar inilah Usman masuk Islam. Berdasarkan penggambaran dalam Buku Sejarah Kebudayaan Islam tingkat MA kelas X, sosok Utsman ibn Affan digambarkan sebagai seorang sahabat yang memiliki sifat lemah lembut dan halus dalam tutur katanya. Selain itu beliau dikenal sebagai seorang laki-laki pemalu sebagaimana suatu ketika, Rasulullah bersabda: “Hai umatku yang

---

<sup>14</sup> Pendapat lain menuliskan bahwa Utsman lahir pada tahun 576 M. Lihat Karim, *Sejarah*, hlm. 89. Menurut As-Suyuthi, ia dilahirkan pada tahun keenam tahun Gajah. Suyuthi, *Tarikh Khulafa: Sejarah Penguasa Islam*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), cet. XI, hlm. 171.

<sup>15</sup> Karim, *Sejarah*, hlm. 89.



paling malu adalah Usman bin Affan”. Karena kelembutannya banyak orang mencintai Usman. Karena pemalu, Usman disegani dan dihormati banyak orang. Ia tidak pernah sama sekali bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Bahkan sebelum masuk Islam pun beliau tidak pernah meminum khamr dan sejenisnya.<sup>16</sup>

Selain dikenal pemalu dan berakhlak baik, Utsman juga dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan. Kedermawanan Utsman sama sekali tidak membuatnya menjadi seseorang yang kikir. Dengan hartanya yang melimpah ia selalu membantu dakwah Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wassalam* dan umat Islam di setiap kesempatan. Beberapa contoh yang dapat menjadi bukti atas kedermawanan Utsman adalah sumbangan atau sedekah berupa 300 ekor unta dan uang 1.000 dinar yang diberikan Utsman ketika Nabi *shalallahu a’alihi wassalam* menyeru kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi ke Tabuk menghadapi tentara Byzantium.<sup>17</sup> Ia juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli sumur atau mata air yang bernama Raumah dari seorang lelaki Yahudi Bani Ghifar seharga 35.000 Dirham untuk kemudian ia wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar, Usman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim paceklik.<sup>18</sup>

Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi yang termasuk ke dalam golongan *Assabiqunnal Awalum* (golongan Muslim yang pertama masuk Islam) melalui ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Semenjak masuk Islam, Utsman bin Affan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dakwah Islam. Ketika umat Islam sampai pada titik dimana permusuhan disertai siksaan kaum kafir Makkah semakin sengit, Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wassalam* akhirnya memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habsyi (Ethiopia sekarang). Utsman lalu ditunjuk sebagai pemimpin hijrah dengan didampingi oleh istrinya, Ruqayyah *radhiyallahu ‘anha*.

Utsman sendiri memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wassalam*. Rasulullah sangat mengagumi ketampanan Usman dan kemuliaan budi pekertinya. Maka dari itu setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah kemudian menikahkan kembali Utsman dengan salah satu putri Rasulullah, yakni Ummu Kultsum. pernikahannya dengan dua putri Nabi inilah yang menjadikan Usman dijuluki *Dzun Nurain* yang artinya “pemilik dua cahaya”. Namun sangat disayangkan, pernikahan Utsman dengan Umu Kultsum juga

---

<sup>16</sup> Elfa Tsuroyya, *Buku Siswa: Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 66.

<sup>17</sup> Miftachul Ula, Maria Ulfa, & M. Husein Tuanaya, *Buku Siswa: Sejarah Kebudayaan Islam (Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 76.

<sup>18</sup> Muh. Asnawi, Sugiyono, & Moh. Sulaiman, *Buku Siswa: Sejarah Kebudayaan Islam (Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 59.

tidak terlalu lama karena Ummu Kultsum meninggal terlebih dahulu. Begitu sayangnya Nabi kepada Utsman hingga Ia pernah berkata, “Seandainya aku punya putri yang lain lagi, pasti akan aku nikahkan juga dengan Usman”.

Kedudukan Usman yang begitu mulia di sisi Nabi membuatnya sangat dihormati oleh kaum muslimin. Pada masa Abu Bakar dan Umar, pendapat Utsman senantiasa didengarkan dan diperhatikan. Tidaklah mengherankan jika Umar bin Khattab menunjuknya sebagai salah satu anggota Dewan Syura. Lewat Dewan Syura itu pula Usman diangkat sebagai khalifah ketiga pada masa Khulafa' ar-Rasyidin.<sup>19</sup>

#### b. Menjadi Khalifah

Pasca peristiwa penikaman Khalifah Umar bin Khattab oleh Abu Lu'luah, seorang budak dari Mughirah bin Syu'bah, Umar yang menyadari ajalnya telah dekat kemudian membentuk sebuah tim formatur untuk menentukan khalifah selanjutnya. Ia memilih enam orang sahabat Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasalam* yang sudah terbukti kredibel dan dianggap paling mampu untuk menentukan khalifah selanjutnya diantara mereka melalui musyawarah. Selain itu Umar juga menetapkan cara pemilihan, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majlis, cara pemilihan ketika suara imbang, dan memerintahkan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan majlis. Majlis ini sendiri dikenal dengan sebutan *Ahlul Halli wal-Aqdi*.

Adapun keenam orang sahabat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqash, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Metode pemilihan Khalifah Umar bin Khattab ini tidak lain menggabungkan antara metode Rasulullah yang tidak menentukan khalifah selanjutnya dan dengan metode Abu Bakar dimana calon khalifah ditentukan secara langsung. Disini Umar menentukan enam orang dan meminta mereka untuk menentukan siapakah yang dipilih menjadi khalifah diantara mereka.<sup>20</sup>

Setelah serangkaian prosesi musyawarah diantara keenam sahabat berjalan lancar dengan berbagai pertimbangan dari keenam kandidat tersebut empat kandidat diantaranya mengundurkan diri sehingga menyisakan dua orang kandidat saja, yakni Utsman bin Affan

---

<sup>19</sup> Miftachul Ula, Maria Ulfa, & M. Husein Tuanaya, *Sejarah*, hlm. 76-77.

<sup>20</sup> Tsurroya, *Sejarah*, hlm. 67-68.

dan Ali bin Abi Thalib.<sup>21</sup> Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Usman bin Affan menjadi khalifah sehingga ia kemudian dibai'at pada hari Senin, 28 Dzulhijjah tahun 23 H, dan mulai menjalankan tugas kekhalfahannya pada bulan Muharam tahun 24 H.<sup>22</sup>

Pada masa pemerintahannya selama kurang lebih 12 tahun, Utsman banyak menorehkan perkembangan bagi dunia Islam melalui serangkaian kebijakan yang diterapkannya. Beberapa kebijakan berhasil Khalifah Utsman terapkan antara lain: [1] perlasan wilayah Islam, meliputi wilayah Armenia, Tunisia, Pulau Cyprus dan lainnya; [2] pembentukan Angkatan laut; [3] kodifikasi dan standarisasi mushaf Al-Qur'an dengan menyeragamkan cara bacanya; [4] pembangunan berbagai fasilitas fisik, seperti perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pembangunan sarana irigasi, bendungan, jalan-jalan, dan lainnya; [5] pengangkatan pejabat negara; dan berbagai kebijakan lainnya.<sup>23</sup>

Diantara berbagai kebijakan yang diterapkan Utsman, terdapat satu kebijakan yang nantinya melahirkan kekacauan bahkan kekacauan pada paruh terakhir masa pemerintahannya, yakni mengenai kebijakan pengangkatan pejabat negara dari anggota keluarganya. Dalam Buku Siswa SKI tingkat MA kelas 10, Utsman yang kala itu sudah tua digambarkan sebagai seorang yang terlalu perhatian dan kurang tegas kepada para kerabatnya. Sifat lemah lembutnya ini kemudian dimanfaatkan oleh anggota keluarganya untuk duduk dalam jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Utsman bagaikan boneka kaum kerabatnya dimana ia hanya menyandang gelar khalifah saja, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh keponakannya, Marwan ibnu Hakam. Bahkan harta kekayaan negara di Baitul Mal, oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri.<sup>24</sup>

Dalam buku SKI kelas X terbitan tahun yang sama, Utsman yang merupakan seorang dermawan yang karena perasaan suka memberi yang tiada batas ini ia juga mempergunakan harta di Baitul Mal untuk keperluan pribadinya dan ada pula yang diberikannya untuk kaum kerabatnya. Seakan-akan beliau tidak sadar bahwa harta Baitul Mal itu adalah kepunyaan kaum Muslimin.

Semakin buruknya keadaan ini tentu menimbulkan banyak kecaman dari umat Islam, khususnya para sahabat Nabi. Mereka kemudian banyak memberi nasihat kepada Khalifah Utsman yang kala itu telah berusia lanjut supaya beristirahat atau mengundurkan diri. Akan tetapi Utsman tidak terima dan menjawab. “Kenapa Aku akan menanggalkan pakaian yang

---

<sup>21</sup> Muh. Asnawi, Sugiyono, & Moh. Sulaiman, *Sejarah*, hlm. 59-60.

<sup>22</sup> Tsurayya, *Sejarah*, hlm. 68.

<sup>23</sup> Miftachul Ula, Maria Ulfa, & M. Husein Tuanaya, *Sejarah*, hlm. 90-91.

<sup>24</sup> *Ibid.*

telah dipakaikan kepada Tuhan-Ku”. Penolakan Utsman ini berdampak pada meningkatnya kebencian rakyat terhadap pemerintahan kala itu sehingga berujung pada meletusnya gerakan pemberontakan terhadap Khalifah Utsman di beberapa wilayah kekuasaan Islam, seperti Kufah, Basrah dan Mesir. Selain itu banyak pula kaum Muslimin yang meninggalkan Utsman sehingga hilanglah kawan-kawan dan orang-orang kepercayaan Utsman, kecuali kaum kerabatnya. Faktor ini pula yang menjadi mungkin menjadi sebab banyaknya kerabat Utsman yang diangkat sebagai pejabat pemerintahan.

Keadaan semakin memburuk ketika seorang tokoh Yahudi yang mengaku Islam bernama Abdullah bin Saba’ mengompori beberapa sahabat dan kelompok pemberontak untuk mengecam dan menghujat khalifah. Para sahabat tersebut antara lain ialah Abu Zar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas’ud. Keadaan semakin kacau tatkala Abdullah bin Saba’ melakukan propaganda dengan membentuk sebuah kelompok bernama “Madzhab Wishayah” yang banyak mendapat pengikut terutama dari golongan pencinta Ali bin Abi Thalib yang selama ini ditekan oleh keluarga Umayyah. Kelompok ini percaya bahwasanya terdapat sebuah wasiat dari Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wassalam* untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sesudah beliau wafat.<sup>25</sup>

#### c. Wafat

Kekacauan yang terjadi pada periode terakhir Utsman berkuasa berujung pada pengepungan Khalifah Usman oleh para pemberontak selama 40 hari, yakni dari bulan Ramadhan hingga Dzulhijah. Beliau diberi dua ultimatum oleh pemberontak, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh. Meski Usman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia memiliki prinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Pada akhirnya para pemberontak berhasil memasuki rumah Utsman dan membunuhnya saat sedang membaca Al-Quran persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasalam* perihal kematian Usman yang syahid nantinya. Utsman bin Affan wafat pada 18 Dzulhijah tahun 35 H bertepatan dengan 20 Mei 656 M setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Beliau dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah.<sup>26</sup>

## 2. Nepotisme dalam Islam

Sebelum membahas lebih jauh terkait permasalahan ini, pertama-tama kita harus memahami pengertian sesungguhnya dari nepotisme. Nepotisme berarti lebih memilih saudara dan teman berdasarkan hubungannya daripada kemampuannya. Kata “nepotisme”

---

<sup>25</sup> Muh. Asnawi, Sugiyono, & Moh. Sulaiman, *Sejarah*, hlm. 63-64.

<sup>26</sup> *Ibid.*

berasal dari bahasa latin yakni *nepos* dan *otis* yang berarti keponakan atau cucu. Sejarah penggunaan kata ini bermula ketika abad pertengahan, dimana kala itu beberapa paus Katholik dan uskup yang telah mengambil janji *chastisy*, tidak memiliki anak kandung sehingga mereka cenderung mengangkat atau memberikan keponakan atau saudara lainnya kedudukan khusus, seperti kardinal.<sup>27</sup>

Kata nepotisme juga berasal dari bahasa Inggris "*nepotism*" yang berarti kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.<sup>28</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nepotisme diartikan sebagai berikut: [1] perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; [2] kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; dan [3] tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.<sup>29</sup>

Selanjutnya pengertian nepotisme secara terminologis dapat ditelaah dari beberapa pendapat ahli berikut ini<sup>30</sup>:

- a. Menurut JW. Schoolr, nepotisme adalah praktek seorang pegawai negeri yang mengangkat seorang atau lebih dari keluarga (dekat)nya menjadi pegawai pemerintah atau memberi perlakuan yang istimewa kepada mereka dengan maksud untuk menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga, atau untuk membantu menegakkan suatu organisasi politik, sedang ia seharusnya mengabdikan kepada kepentingan umum.
- b. Menurut Sayed Husen al-Athas, nepotisme adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 1 ayat 5, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan

---

<sup>27</sup> Danang SB, *Menguak Sejarah dan Budaya KKN di Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), hlm. 4.

<sup>28</sup> Huzaemah T. Yanggo, "Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap (KKNS) dalam Pandangan Hukum Islam", *Tahkim*, Vol. IX, No. 1, Juni 2013, hlm. 348.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. III, hlm. 780.

<sup>30</sup> Yanggo, *KKN*, hlm. 3.

kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa definisi mengenai nepotisme tersebut, dapat diambil sebuah rumusan bahwa nepotisme adalah tindakan pemegang jabatan publik (aparatur negara atau pegawai negeri) yang cenderung mengutamakan sanak keluarga atau orang terdekatnya dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang terkait dengan urusan publik dan menyalahi prinsip *merit system* atau sistem pengangkatan berdasarkan pendidikan, keahlian, pengalaman dan prestasi.<sup>32</sup>

Perilaku nepotisme yang seringkali dijalankan oleh beberapa oknum pemerintahan dengan cara mengawetkan serta memaksakan kehendak dan kepentingan dalam batasan tertentu tentu tidak dapat dilepaskan dari tujuan nepotisme sendiri. Perilaku nepotisme sendiri pada dasarnya ditujukan untuk melanggengkan kekuasaan (politik) dan penguasaan ekonomi (bisnis) di tangan salah satu atau sekelompok oknum tertentu. Imbasnya, perilaku ini pada akhirnya melahirkan praktik monopoli yang diminati oleh keluarga atau orang-orang terdekat tertentu di satu sisi dan tentu merugikan pihak lain di sisi lain.<sup>33</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, nepotisme dipandang sebagai sesuatu yang tercela dan dilarang oleh agama tatkala penempatan keluarga dalam suatu posisi hanya berlandaskan pada hubungan kekeluargaan saja, sedangkan ia tidak memiliki kemampuan atau kompetensi. Atau memiliki kemampuan, tapi masih ada orang lain yang lebih baik dan berhak untuk jabatan itu, namun yang didahulukan adalah keluarganya. Pelarangan nepotisme jenis ini tidak lain disebabkan oleh ajaran Islam melarang umatnya untuk menzalimi atau mengambil hak orang lain (dalam konteks ini dimaksudkan pada hak seseorang yang diambil oleh orang yang berkemampuan di bawahnya).<sup>34</sup>

Namun, dalam Islam sendiri kriteria suatu kebijakan atau tindakan yang dipandang sebuah upaya nepotisme tidak hanya selalu dilihat dari sudut pandang ada tidaknya hubungan darah atau kekerabatan seseorang dengan pihak tertentu saja. Karena Islam sendiri memiliki pengecualian terkait permasalahan nepotisme ini. Nepotisme akan diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan tatkala pengangkatan keluarga atau kerabat dekat dalam

---

<sup>31</sup> Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

<sup>32</sup> M. Dawam Rahardjo, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 25.

<sup>33</sup> Murtiningsih, "Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman bin Affan dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib", *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 19, No. 1, Juni 2018, hlm 162.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 163.

menduduki jabatan tertentu, dilakukan dengan catatan ia mempunyai kemampuan yang teruji, keahlian yang handal dan akhlak yang terpuji di mata masyarakat. Hal ini sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam Al-Qur'an bahwa pengangkatan dan pemilihan seseorang untuk menjabat suatu kedudukan harus didasarkan pada pertimbangan kapabilitas (kemampuan dan rasa tanggung jawab), profesionalitas (keahlian) dan moralitas (*akhlaqul karimah*). Selain itu seseorang yang hendak dipercayakan suatu jabatan tertentu juga harus mempunyai integritas pribadi dan kredibilitas sosial yang tinggi, sekalipun ia adalah kerabat atau orang dekat pemerintahan.<sup>35</sup>

Salah satu contoh kasus dalam sejarah Islam terkait kebolehan melakukan nepotisme berdasarkan kriteria di atas adalah kebijakan pengangkatan Usamah bin Zaid (Zaid adalah anak angkat Nabi) oleh Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* sebagai panglima perang Islam dalam upaya untuk menghadapi serangan pasukan Romawi Byzantium di wilayah Syam karena dinilai mempunyai kemampuan dan keberanian serta integritas pribadi yang baik, di samping dipandang mampu mengemban kemaslahatan umat. Hal ini kemudian terbukti pada masa Khalifah Abu Bakar, penerus pemerintahan Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*, dimana pasukan Usamah berhasil meraih kemenangan dalam peperangan tersebut.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam hanya melarang tindak nepotisme yang dilakukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan pertalian darah atau kekerabatan saja, tanpa memperhatikan aspek kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan. Sedangkan nepotisme yang dilakukan atas dasar pertimbangan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan, maka hal itu tidak dilarang. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan mengenai kebijakan pengangkatan pejabat negara pada masanya bukan termasuk ke dalam kriteria nepotisme yang dilarang.

### **3. Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman bin Affan**

Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah (*Amirul mu'minin*) pada tahun 644 M dan dilantik tiga hari setelah kematian khalifah sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M).<sup>37</sup> Masa pemerintahan Khalifah Utsman berlangsung selama kurang lebih 12 (dua

---

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil dkk, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam*, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 108-109.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, hlm. 177.

belas) tahun sejak tahun 644-656 M dengan dibagi ke dalam dua periode pemerintahan, yakni periode pertama yang disebut sebagai Periode Kemajuan dan periode kedua disebut Periode Kemunduran hingga Utsman terbunuh. Pada periode pertama kekhalifahan Utsman, dunia Islam mengalami kemajuan yang luar biasa, berkat jasa para panglima Muslim yang berkualitas dan ahli, wilayah kekuasaan Islam menyebar luas dari perbatasan Aljazair (Barqah – Tripoli, dan Syprus di front *al-Maghrib* bahkan sumber lain menyatakan sampai ke Tunisia) di *al-Maghrib* (Barat), sampai ke Aleppo dan sebagian Asia Kesil di Utara, *Ma Wara al-Nahar* (Transoxiana) di Timur Laut dan seluruh Persia di Timur, bahkan sampai ke perbatasan Baluchistan (wilayah Pakistan sekarang) serta Kabul dan Ghazni. Selain itu Utsman juga berhasil membentuk armada laut pertama dalam Islam sekaligus berhasil memperoleh kemenangan pertama di laut dalam sejarah Islam setelah berhasil menghalau serangan-serangan yang dilancarkan oleh tentara Bizantium di Laut Tengah. Namun, periode kedua masa Khalifah Utsman berkuasa justru identik dengan masa kemunduran disertai dengan berbagai konflik dan huru-hara yang menimbulkan kekacauan hingga Utsman terbunuh.<sup>38</sup>

Meletusnya kekacauan pada periode kedua masa pemerintahan Utsman, salah satu penyebabnya adalah tuduhan nepotisme yang dilayangkan kepada Khalifah Utsman. Tuduhan ini muncul setelah beberapa kali Utsman mengganti sebagian pejabat pemerintahan era Umar bin Khattab yang dianggap kurang baik dengan anggota keluarganya yang lebih dipercaya. Adapun beberapa pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman dari sanak saudaranya antara lain<sup>39</sup>:

- a. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sebagai gubernur Mesir menggantikan Amr bin Ash. Beliau adalah saudara sepersusuan Utsman (sumber lain; saudara angkat).
- b. Abdullah bin Amir menggantikan Abu Musa Al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah. Beliau adalah saudara sepupu Utsman.
- c. Walid bin Uqbah sebagai Gubernur Kufah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqqash. Beliau adalah saudara tiri Utsman.
- d. Sa'ad bin Ash menggantikan gubernur terpilih Kufah atas permintaan rakyatnya. Beliau adalah keluarga dekat Khalifah Utsman.
- e. Marwan bin Hakam (saudara sepupu Khalifah Utsman, putra pamannya Hakam bin Abi Al-Ash) ditugaskan sebagai pengawas *diwan* dan sekretaris negara.

---

<sup>38</sup> Karim, *Sejarah*, hlm. 91.

<sup>39</sup> Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Zaman, 2018), hlm. 220, dan Karim, *Sejarah*, hlm. 91-97.



f. Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan saudara sepupu Khalifah Utsman sebagai gubernur Syam.

Pengangkatan pejabat pemerintahan dari kalangan kerabat dan keluarganya membuat Utsman mendapatkan stigma nepotisme dari umat Islam, terkhusus dari kelompok konspirasi di Saba' yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba'.<sup>40</sup> Kelompok ini seringkali menebarkan berbagai fitnah dan konspirasi kepada para gubernur Utsman dengan tujuan untuk menghancurkan agama, negara dan umat Islam karena kebencian. Selain mereka, ada juga kelompok lain yang dimotori oleh para sahabat senior atau disebut juga kelompok oposisi, yang bertujuan untuk meluruskan kekeliruan dan menyampaikan kebenaran secara tegas, jujur serta nasihat yang baik. Kelompok ini berpandangan bahwa Khalifah Utsman hendaknya memberhentikan para pejabat yang berasal dari kalangan keluarga dan kerabatnya, yakni Bani Umayyah, karena khawatir akan menimbulkan stigma nepotisme dalam pemerintahan Utsman jika posisi kerabatnya tersebut masih dipertahankan.<sup>41</sup>

Menyikapi saran yang diajukan oleh kelompok oposisi, Khalifah Utsman tidak langsung menyetujui saran mereka tanpa pertimbangan yang matang. Tindakan Utsman ini tidak bermaksud meragukan kebersihan tujuan para sahabat senior, seperti Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir, terkait sikap mereka yang bertentangan dengan para pejabat tersebut. Akan tetapi Utsman memiliki pertimbangan lain jikalau memang para pejabat yang berasal dari kalangan keluarganya harus digantikan. Menurutnya, alasan pemberhentian mereka hanya karena berasal dari hubungan keluarga dan kerabat atau bergaya hidup mewah itu tidak masuk akal. Atas dasar ini, Utsman akhirnya memilih beberapa sahabat yang berintegritas serta terkenal akan sifat amanah dan *wara'*nya untuk diutus ke beberapa wilayah kekuasaan Islam dan melakukan inspeksi terhadap kehidupan gubernur dan pejabatnya. Beberapa sahabat yang diamanahi Khalifah Utsman menjalankan tugas ini adalah Muhammad bin Maslamah ke Kufah, Abdullah bin Umar ke Syam, Ammar bin Yasir ke Mesir, dan Usamah bin Zaid ke Basrah. Alhasil sepulang dari daerah inspeksi masing-masing sahabat, mereka kemudian menyampaikan laporan hasil penilaiannya tentang apa yang mereka saksikan dan dengar kepada Khalifah Utsman.<sup>42</sup>

Pada dasarnya hak menentukan dan memilih sendiri pejabat yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan adalah hak seorang khalifah. Namun, tentu pemilihan

---

<sup>40</sup> Abdullah bin Saba' atau dipanggil juga Abu Sauda adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam untuk menebarkan fitnah dan menghancurkan Islam dari dalam.

<sup>41</sup> Khalid Muhammad Khalid, *'Utsman ibn 'Affan: Khalifah Penjunjung Al-Qur'an*, terj. Rashid Satari, (Bandung: Penerbit Mizania, 2014), hlm. 113-114.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 114-115.

tersebut bukan dilatarbelakangi oleh hawa nafsu semata dan juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>43</sup> Selain itu, pejabat tersebut harus terbukti memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni, bukan sekedar hanya pertalian darah saja. Sebagaimana kebijakan pemilihan pejabat masa sebelumnya, Khalifah Utsman bin Affan pun turut menerapkan standar kebijakan pendahulunya ketika memilih pejabat pemerintahan. Maka barang tentu tuduhan nepotisme yang dilayangkan kepada Utsman terkait kebijakan beliau ketika mengangkat pejabat pemerintahan semata-mata karena hubungan kekeluargaan itu tidak dapat dibenarkan.

Utsman bin Affan RA pernah mengatakan secara langsung di hadapan para sahabat bahwasanya ia tidak mungkin mengangkat seseorang dalam pemerintahan kecuali telah disepakati, dewasa, diterima oleh penduduk negerinya dan tentu memiliki kompetensi masing-masing sesuai dengan jabatan yang mereka emban. Apabila Utsman memang bermaksud mengangkat keluarganya dalam pemerintahan tanpa memperhatikan kepentingan umat Islam bahkan mengorbankannya, maka tentu ia akan mengutamakan pengangkatan anak asuhnya, Muhammad bin Abi Hudzaifah, untuk menjabat di pemerintahan. Akan tetapi Khalifah Utsman sama sekali tidak berkenan mengangkatnya karena dinilai tidak mampu. Utsman berkata, “Wahai putraku, kalaulah aku menerima dan kamu meminta jabatan kepadaku, maka tentulah aku mengangkatmu. Akan tetapi aku bukanlah orang semacam itu.”<sup>44</sup> Sikap semacam ini Utsman lakukan bukan karena membenci ataupun menghindari anaknya, akan tetapi ini merupakan wujud profesionalitas dan kebijaksanaan Utsman sebagai seorang khalifah.

Profesionalitas Khalifah Utsman juga dibuktikan tatkala ia menerima laporan-laporan hasil inspeksi dari para sahabat yang telah ia tugaskan sebelumnya ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. berdasarkan laporan tersebut, Utsman kemudian beberapa kali mengganti beberapa pejabat yang terbukti kurang mampu atau melakukan pelanggaran meski berasal dari keluarga atau kerabatnya sekalipun. Hal ini tentu mengisyaratkan bahwa meskipun Utsman sangat menyayangi keluarganya, beliau tidak tutup mata ketika mereka melakukan pelanggaran. Berikut ini beberapa upaya *reshuffle* pejabat era kepemimpinan Utsman bin Affan yang berkaitan dengan posisi keluarganya dalam pemerintahan beserta alasannya<sup>45</sup>:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 107-108.

<sup>44</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Utsman bin Affan*, terj. Masturi Ilham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 379-340.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 108-109, dan Karim, *Sejarah*, hlm. 92-97.

- a. Khalifah Utsman mempertahankan posisi Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai Gubernur Syam. Muawiyah sendiri telah diangkat menjadi Gubernur Syam sejak masa Umar bin Khattab atas kecakapan dan kemampuannya. Selain itu Muawiyah juga turut memiliki andil besar dalam keberhasilan pasukan Islam di berbagai peperangan di wilayah front Utara. Atas dasar ini kebijakan Utsman mempertahankan Muawiyah bukan karena Muawiyah adalah keluarga Utsman, melainkan karena Muawiyah memang layak untuk terus memimpin Syam.
- b. Selanjutnya di Basrah, posisi Abu Musa Al-Asy'ari sebagai *Amir* (gubernur) Basrah digantikan oleh sepupu Utsman, Abdullah bin Amir. Alasan Abu Musa diberhentikan oleh Utsman tidak lepas dari keluhan masyarakat Basrah yang menganggap Abu Musa lebih mengutamakan orang Quraisy dibandingkan masyarakat asli setempat. Selain itu beliau dikenal sebagai panglima yang kikir oleh pasukannya. Sebenarnya sebelum menunjuk Ibnu Amir sebagai Gubernur Basrah, Utsman sempat memberikan hak kepada masyarakat Basrah untuk memilih *Amir* dari kalangan mereka sendiri secara demokratis. Namun, *amir* pilihan mereka gagal dan kurang cakap hingga pemilihan *amir* di Basrah kembali diputuskan oleh khalifah. Atas dasar pertimbangan keberhasilan Abdullah bin Amir dalam penaklukan daerah Persia, Khalifah Utsman pun menunjuknya menjadi Gubernur Basrah.
- c. Perombakan pejabat di Kufah berawal ketika pemberhentian Gubernur Mughirah bin Syu'bah atas perintah dari Khalifah Umar yang baru terlaksana pada masa Utsman serta permintaan dan desakan dari penduduk Kufah yang kemudian digantikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash. Sementara itu Sa'ad juga diberhentikan karena penyalahgunaan jabatan, yakni meminjam uang dari kas provinsi tanpa sepengetahuan khalifah. Selain itu Ibnu Mas'ud (termasuk keluarga dekat Utsman) juga diberhentikan karena penyalahgunaan jabatannya sebagai *Amir*<sup>46</sup>. Utsman kemudian mengirim Walid bin Uqbah sebagai penggantinya. Walid banya berjasa dalam peperangan melawan Azerbaijan dan Armenia selama menjadi Gubernur Kufah. Namun, karena banyak keluhan bahwa gubernur adalah peminum khamr dan pembawaannya yang keras dan kasar, akhirnya Utsman memberhentikan Walid dan memberlakukan hukuman *had* terhadapnya. Setelah itu Khalifah Utsman menyerahkan pemilihan gubernur Kufah kepada penduduknya meskipun hanya berkuasa selama beberapa bulan. Atas permintaan rakyatnya, Utsman kemudia menunjuk Sa'ad bin Al- 'Ash sebagai *Amir* Kufah karena kecakapan dan

---

<sup>46</sup> Pengelola urusan zakat dan urusan perpajakan sekaligus administrator keuangan.

prestasinya dalam menaklukkan front Persia Utara. Khalifah Utsman kemudian kembali memberhentikan Sa'ad bin Ash sebagai Gubernur Kufah karena situasi Kufah yang tidak kondusif akibat tuduhan terhadap Sa'ad yang cenderung menomorduakan masyarakat pribumi atas orang Arab (Umayyah), juga orang yang tidak sabaran dan peminum khamr. Untuk mengatasi permasalahan ini Utsman kemudian menunjuk Abu Musa Al-Asy'ari - mantan Gubernur Basrah- menjadi Gubernur Kufah berikutnya,

- d. Pada masa Umar bin Khattab, pemerintahan di Mesir dibagi menjadi 2 bagian, yakni Mesir Utara dengan Amr bin Ash sebagai *amir* sekaligus *amil* dan wilayah Nubia (Mesir Selatan) dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sebagai *amir* dan *amil* disana. Namun, setelah Utsman melihat bahwa Abdullah lebih sukses dalam tugasnya sebagai *amil* dibanding Amr, Utsman kemudian menempatkan Abdullah sebagai *amil* sedangkan Amr ditunjuk sebagai *amir* dan panglima untuk seluruh Mesir. Selain itu alasan lainnya adalah keinginan Utsman untuk membangun pasukan dan armada laut yang kuat guna menghadapi armada laut Byzantium, maka beliau membutuhkan kemampuan Abdullah dalam mengumpulkan dana yang terbukti sukses. Menyikapi hal ini, Amr bin Ash tidak terima dan menolak keputusan Utsman dengan melampaui batas kesopanan. Pada akhirnya, Amr diberhentikan dari jabatan di Mesir dan Abdullah diangkat menjadi *amir* dan *amil* tunggal untuk seluruh wilayah Mesir. Dalam tulisan Hitti (2018), Perlu dicatat bahwa posisi Abdullah di Mesir sendiri semakin kuat tatkala ia berhasil meraih serangkaian kemenangan di laut bersama Mu'awiyah dan armada laut Islam dalam upaya menghadapi armada kapal Yunani dan Byzantium di Laut Tengah.
- e. Pengangkatan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris negara dan pengawas *diwan* oleh Khalifah Utsman. Alasan dibalik pengangkatan ini bukan semata-mata karena Marwan merupakan keluarga Utsman, akan tetapi Marwan merupakan salah satu sahabat yang ahli dalam urusan tatanegara.

#### **4. Strategi Pencegahan Munculnya Mispersepsi Siswa MA Terhadap Penggambaran Nepotisme Utsman**

Pada dasarnya, implementasi Kurikulum 2013 di dunia pendidikan diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional secara bertahap. Namun, dalam prosesnya seringkali timbul berbagai masalah dan tantangan baik itu dari pihak pemerintah, sekolah, guru maupun peserta didik. Bahkan semenjak proses sosialisainya pun belum dilakukan secara optimal, tidak menyentuh seluruh pelaksana di lapangan, sehingga para

guru masih banyak mengalami kebingungan.<sup>47</sup> Salah satu contoh dari permasalahan yang timbul dalam proses pengimplementasian kurikulum ini adalah segi sumber belajarnya, yakni buku pedoman siswa.

Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan buku-buku wajib, seperti buku guru dan buku pedoman siswa, yang harus dipelajari oleh peserta didik. Namun, mereka juga memperbolehkan penggunaan buku-buku pelengkap dalam proses pembelajaran selama tetap berpedoman pada rekomendasi atau pengesahan dari dinas pendidikan.<sup>48</sup> Hanya saja masih banyak pihak guru yang tidak memanfaatkan kebijakan ini dengan berkatut pada buku-buku yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini memberikan peluang bagi timbulnya permasalahan dalam proses pembelajaran bahkan menimbulkan kesalahpahaman atau mispersepsi bagi para siswa.

Termasuk salah satu mispersepsi tersebut adalah penjelasan mengenai tuduhan nepotisme kepada Khalifah Utsman bin 'Affan yang cenderung mengarah pada hal yang negatif melalui penggambaran dalam buku siswa Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah (MA) kelas X. Padahal seperti yang telah dijelaskan bahwa nepotisme yang dilakukan Khalifah Utsman tersebut diperbolehkan oleh Islam karena dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang. Perlu kiranya disusun sebuah strategi untuk mencegah ataupun meluruskan kesalahpahaman atau mispersepsi ini agar tidak semakin berlarut-larut.

Strategi yang dapat digunakan untuk mencegah timbulnya mispersepsi bagi siswa Madrasah Aliyah. Pertama, pemerintah (khususnya Kemenag) harus meninjau kembali penyusunan buku bahan ajar yang dijadikan pedoman oleh pihak sekolah dalam mengajar. Karena dalam penerapan Kurikulum 2013 pihak sekolah harus mengikuti arahan dari pusat, termasuk dalam penggunaan buku bahan ajar. Maka pihak pemerintah juga harus terus memperbaiki segala kekurangan yang terdapat di dalam buku bahan ajar dengan tetap berpedoman pada silabus yang telah disusun dan disepakati oleh dinas pendidikan dan pihak instansi sekolah.<sup>49</sup>

Kedua, tenaga pendidik seharusnya tidak hanya terpaku pada penggunaan sumber bahan ajar dari satu macam buku saja. Kendatipun buku siswa merupakan buku yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, para guru juga harus memperluas sumber bahan ajar

---

<sup>47</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), cet. III, hlm. 35-36.

<sup>48</sup> *Ibid*, 49-50.

<sup>49</sup> Syafruddin Nurdin & Adriantoni, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. II, hlm. 82-83.

dengan menggunakan referensi lain yang berisikan materi yang sama, tapi dengan isi yang berbeda ataupun lebih lengkap. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan sumber bahan ajar lain dari internet, jurnal, makalah, koran, CD interaktif, lingkungan dan masih banyak lagi. Disamping rekomendasi dari dinas pendidikan, sumber bahan ajar juga harus dipilih berdasarkan tiga prinsip, yakni prinsip relevansi (memiliki kaitan atau hubungan dengan standar kompetensi), prinsip konsistensi (sesuai dengan kompetensi dasar dari segi cakupan pembahasan) dan prinsip kecukupan (tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak).<sup>50</sup>

Ketiga, peserta didik (para siswa) harus memanfaatkan Kurikulum 2013 yang menekankan model pembelajaran aktif (active learning) dengan sebaik-baiknya. Penerapan model ini sendiri dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara sempurna dengan harapan terwujudnya peserta didik yang dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki.<sup>51</sup> Selain dari buku bahan ajar dan materi yang disampaikan oleh guru, para siswa harus aktif mencari referensi lain yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Dengan begitu tingkat penguasaan mereka terhadap materi tidak hanya terpaku pada satu sumber, yakni apa yang disampaikan guru. Pengetahuan dan wawasan siswa akan semakin luas sehingga mereka bisa mengetahui materi mana yang dirasa kurang. Selain itu para siswa juga dapat menggunakan metode diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan terkait materi yang sedang dipelajari ataupun bertukar pendapat dengan orang lain dalam prosesnya.

## E. KESIMPULAN

Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi sekaligus khalifah ketiga dan pemerintahan Khulafa ar-Rasyidun. Berdasarkan pemaparan dalam Buku Siswa SKI tingkat MA kelas 10, Utsman bin Affan digambarkan salah satu sahabat utama yang dikenal pemalu dan berakhlak baik, serta dermawan. Ia adalah seorang menantu kepercayaan Rasulullah Saw yang memperoleh gelar “*Dzun Nurain*” atau “Pemilik Dua Cahaya” setelah menikahi dua putri Rasulullah Saw. Utsman diangkat menjadi khalifah umat Islam Senin, 28 Dzulhijjah tahun 23 H/644 M setelah melalui serangkaian proses pemilihan yang diselenggarakan oleh komite pemilihan khalifah bentukan Umar. Beralih pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, Utsman yang kala itu sudah tua digambarkan sebagai seorang yang terlalu perhatian dan kurang tegas kepada para kerabatnya.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>51</sup> Ruhban Masykur, *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum*, (Lampung: Aura, 2019), hlm. 130.

Sifat lemah lembutnya ini kemudian dimanfaatkan oleh anggota keluarganya untuk duduk dalam jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Mulai dari sinilah serangkaian kecaman dan fitnah keji mulai menyala dalam tubuh umat Islam dengan melayangkan tuduhan nepotisme kepada Utsman. Merebaknya tuduhan kemudian memantik munculnya berbagai gerakan pemberontakan terhadap khalifah yang berasal dari beberapa wilayah kekuasaan Islam, seperti Kufah, Basrah dan Mesir. Pada akhirnya seluruh kekacauan ini menimbulkan sebuah tragedi yang sangat menyakitkan, yakni peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada 18 Dzulhijjah tahun 35 H/20 Mei 656 M oleh pihak pemberontak.

Tuduhan nepotisme yang dilayangkan kepada Khalifah Utsman bin Affan mulai muncul pada periode kedua masa pemerintahan Utsman. Tuduhan ini muncul setelah beberapa kali Utsman mengganti sebagian pejabat pemerintahan era Umar bin Khattab yang dianggap kurang baik dengan anggota keluarganya yang lebih dipercaya. Seperti pengangkatan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah (saudara sepersusuan Utsman) sebagai gubernur Mesir menggantikan Amr bin Ash, pengangkatan Abdullah bin Amir (sepupu Utsman) menggantikan Abu Musa Al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah. Beliau adalah saudara sepupu Utsman dan lainnya. Pengangkatan pejabat pemerintahan dari kalangan kerabat dan keluarganya membuat Utsman mendapatkan stigma nepotisme dari umat Islam. Padahal pada dasarnya hak menentukan dan memilih sendiri pejabat yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan adalah hak seorang khalifah. Namun, tentu pemilihan tersebut bukan dilatarbelakangi oleh hawa nafsu semata dan juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kendatipun memiliki hubungan darah, pejabat tersebut harus terbukti memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tuduhan nepotisme yang dilayangkan kepada Utsman terkait kebijakan beliau ketika mengangkat pejabat pemerintahan semata-mata karena hubungan kekeluargaan itu tidak dapat dibenarkan. Karena hakikatnya, Islam sendiri tidak melarang nepotisme selama pengangkatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan. Selain itu pemilihan tersebut juga tidak boleh menzalimi atau mengambil hak orang lain (dalam konteks ini dimaksudkan pada hak seseorang yang diambil oleh orang yang berkemampuan di bawahnya).

Dalam upaya pencegahan terhadap munculnya mispersepsi atau kesalahpahaman bagi siswa Madrasah Aliyah terkait tuduhan nepotisme terhadap Khalifah Utsman bin Affan, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain: Pertama, pemerintah (khususnya Kemenag) harus meninjau kembali penyusunan buku bahan ajar yang dijadikan pedoman oleh pihak sekolah dalam

mengajar; Kedua, tenaga pendidik harus memperluas sumber bahan ajar dengan menggunakan referensi lain yang dipilih berdasarkan prinsip relevansi, prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan; Ketiga, peserta didik (para siswa) harus aktif mencari referensi lain yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas sekaligus menggunakan metode diskusi untuk menambah wawasan dan penguasaan terhadap materi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Admin web SMK Al-Husna. 2021. *Kekurangan dan Kelebihan Kurikulum 2013*. Diakses melalui laman web smkalthusna.sch.id: <https://smkalthusna.sch.id/2021/03/31/kekurangan-dan-kelebihan-kurikulum-2013/> (5 Desember 2022).
- Alawiyah, Faridah. "Pendidikan Madrasah di Indonesia". *Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014: 51-58.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad Ash-Shalabi. 2013. *Biografi Utsman bin Affan*. Terj. Masturi Ilham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asnawi, Muh., Sugiyono, dan Moh. Sulaiman. 2014. *Buku Siswa: Sejarah Kebudayaan Islam (Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Danang. 2019. *Menguak Sejarah dan Budaya KKN di Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. III.
- Djamil, Fathurrahman dkk. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam*. Dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.). *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Hitti, Philip K. 2018. *History Of The Arabs*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Zaman.
- Karim, M. Abdul. 2019. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara. Cet. VIII.
- Khalid, Khalid Muhammad. 2014. *'Utsman ibn 'Affan: Khalifah Penjunjung Al-Qur'an*. Terj. Rashid Satari. Bandung: Penerbit Mizania.
- Madjid, M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi. 2014. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: KENCANA.
- Maryam, Siti dkk. 2012. *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI. Cet. IV.



- Masykur, Ruhban. 2019. *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum*. Lampung: Aura.
- Mulyasa, E. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. III.
- Murtiningsih. “Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman bin Affan dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib”. *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 19, No. 1, Juni 2018: 159-176.
- Nurdin, Syafruddin dan Adriantoni. 2016. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Cet. II.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*. Dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.). *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suyuthi. 2014. *Tarikh Khulafa: Sejarah Penguasa Islam*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. XI.
- Tsuroyya, Elfa. 2019. *Buku Siswa: Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ula, Miftachul, Maria Ulfa, dan M. Husein Tuanaya. 2014. *Buku Siswa: Sejarah Kebudayaan Islam (Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Yanggo, Huzaemah T. “Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Suap (KKNS) dalam Pandangan Hukum Islam”, *Tahkim*, Vol. IX, No. 1, Juni 2013: 159-176.